

## **ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM DATA PILAH GENDER DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**Rahmi Syahriza**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

e-mail: rahmi.syahriza@uinsu.ac.id

**Nashrillah MG**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

e-mail: rahmi.syahriza@uinsu.ac.id

**Nurasiah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

e-mail: nurasiah@uinsu.ac.id

DOI: 10.15548/jk.v13i1.524

Accepted: June 08th2023. Approved: June 28th2023. Published: June 30 2023

(Diterima: 08 Juni 2023. Disetujui: 28 Juni 2023. Diterbitkan: Juni 30 2023

### ***Abstrack***

*The realization of Gender Responsive Budgeting Planning (PPRG) is supported by the existence of a gender disaggregated data system in a university. This study aims to determine the implementation and effectiveness of the gender disaggregated data system at the State Islamic University of North Sumatra. This research is a qualitative research. Data was collected by means of in-depth interviews with the University, all faculties, and the Information Center and UIN North Sumatra Database. The results showed that the gender disaggregation data system had not been fully implemented by UIN North Sumatra. Although in practice, gender justice has been carried out quite maximally with the opportunities given to lecturers and education staff who occupy strategic positions at UIN North Sumatra. The existence of the Center for Gender and Child Studies at UIN North Sumatra also plays a significant role with the dissemination of the Gender Based System (GBS) and Gender Analysis Pathway (GBP), but the implementation and development of an integrated gender disaggregation data system is still not effective. This is due to the coordination has not been optimal in all lines and units on campus, and there are still no policies and regulations related to the legality of an integrated and interconnected gender disaggregated data system at UIN North Sumatra.*

**Keywords:** *effectiveness, implementation, system, data, gender disaggregated data*

Terwujudnya Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) didukung dengan adanya sistem data pilah gender di sebuah perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan efektivitas sistem data pilah gender di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam kepada pihak Universitas, semua fakultas, dan bagian Pusat Informasi dan pangkalan Data UIN Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem data pilah pilah gender belum sepenuhnya diterapkan oleh UIN Sumatera Utara. Meskipun dalam prakteknya, keadilan gender sudah dilaksanakan cukup maksimal dengan adanya kesempatan yang diberikan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang menduduki jabatan strategis di UIN Sumatera Utara. Keberadaan Pusat Studi Gender dan Anak yang ada di UIN Sumatera

Utara juga memberikan peran yang cukup besar dengan dilakukannya sosialisasi Gender Based System (GBS) dan Gender Analysis Pathway (GBP), tetapi pelaksanaan dan pembuatan sistem data pilah gender yang terintegrasi masih belum efektif. Hal ini karena koordinasi yang belum maksimal di semua lini dan unit yang ada di kampus, kemudian juga masih belum adanya kebijakan dan regulasi terkait legalitas sistem data pilah gender yang terintegrasi dan terinterkoneksi di UIN Sumatera Utara.

**Keywords:** efektivitas, implementasi, sistem, data, data pilah gender

## PENDAHULUAN

Mansour Fakih menuliskan bahwa gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Oleh sebab itu gender berkaitan dengan proses keyakinan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada (Fakih, 2013:7-8). Secara sosial, kritikan terhadap wanita berakar pada sektor domestik, yaitu institusi keluarga. Pendapat ini sama dengan teori yang disampaikan oleh Socrates untuk menghilangkan keluarga konvensional. Selain itu, seorang pemikir feminis teoritis awal Jhon Stuart Mill pada tahun 1869 mengungkapkan bahwa pekerjaan perempuan di sektor domestik, sebagai pekerjaan yang irasional, emosional dan tiranis.

Konsep yang paling penting dan harus dipahami dalam membahas hubungan kaum perempuan dan laki-laki adalah membedakan antara konsep jenis kelamin (*sex*) dan konsep gender. Pemahaman terkait perbedaan kedua konsep itu sangat diperlukan dalam menganalisis serta memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang dialami kaum wanita. Hal ini karena eratnya kaitan antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas (Fakih, 2013:8).

Konsep di atas dapat dijelaskan yaitu bahwa istilah gender biasa digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sedangkan istilah *sex* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah *sex* lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Adapun *gender* lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya (Umar, 1999:35).

Perbedaan ini mengakibatkan munculnya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertugas mengurus urusan luar rumah dan perempuan bertugas mengurus urusan dalam rumah. Istilah lain yang dikenal untuk ini adalah sebagai masyarakat pemburu (*hunter*) dan peramu (*gatherer*) dalam masyarakat tradisional, sektor publik, dan domestik dalam masyarakat modern (Nasaruddin Umar, 1999:302).

Peran gender (*gender role*) kemudian lahir sebagai proses lanjutan dari perbedaan gender (*gender differences*), namun dianggap tidak menimbulkan masalah, sehingga tidak pernah digugat. Hal yang menjadi masalah dan perlu digugat adalah *struktur ketidakadilan* yang ditimbulkan oleh *peran gender* dan *perbedaan gender* (Lubis, 2003: 47).

Pengungkapan masalah kaum perempuan dengan menggunakan analisis gender sering menghadapi perlawanan (*resistance*), baik dari kalangan kaum laki-laki ataupun kaum perempuan sendiri. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh: *pertama*, mempertanyakan status kaum perempuan pada dasarnya adalah mempersoalkan sistem dan struktur yang telah mapan, sedangkan yang *kedua*, mendiskusikan soal gender berarti membahas hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi yang menyangkut dan melibatkan individu (Fakih, 2013, 8-9). Dengan demikian pemahaman atas konsep gender sesungguhnya merupakan isu mendasar untuk

menjelaskan masalah kesetaraan hubungan, kedudukan, peran dan tanggung jawab antara kaum perempuan dan laki-laki.

Pengarusutamaan gender adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengarusutamaan gender merupakan proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh proyek, program, dan kebijakan pemerintah. Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pembangunan (Gender,2018).

Pengarusutamaan Gender (PUG) di bidang pendidikan secara teknis sudah diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 84 tahun 2008. Permendiknas ini telah mengatur kebijakan fundamental dan strategis tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan. Kebijakan ini merupakan kebijakan fundamental dan strategis karena lembaga pendidikan sebagai sebuah lembaga transfer nilai, ide, pemikiran dan pengetahuan, dan ini dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap seseorang. Selain itu, lembaga pendidikan merupakan sebuah lembaga dinamis yang mempersiapkan, menghasilkan, menumbuhkan dan mengembangkan potensi sumberdaya manusia. Setelah hampir 2 dekade sejak penetapannya sebagai suatu kebijakan pembangunan, strategi PUG belum terlaksana secara merata dan belum menampakkan hasil yang diharapkan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan hal ini Irma Mulyani telah melakukan analisis untuk menuju perguruan tinggi responsif gender. Hal ini dapat dilihat dalam penelitiannya bahwa pada dasarnya IAIN Ponorogo telah memiliki modal yang memadai untuk mewujudkan diri menjadi perguruan tinggi responsif gender. Jika modal-modal tersebut tidak dapat diramu dengan baik oleh para pemangku kepentingan, penelitian ini menemukan potensi yang menghambat mewujudnya IAIN Ponorogo sebagai perguruan tinggi responsif gender. Beberapa peluang penting yang tidak dimiliki oleh Perguruan Tinggi lain namun dimiliki oleh IAIN Ponorogo adalah, memiliki rektor perempuan dengan perspektif gender yang baik. Kondisi ini menunjukkan peluang yang cukup besar bagi IAIN Ponorogo untuk mewujudkan diri menjadi perguruan tinggi responsif gender (Yuliani,2022:195).

Langkah serupa juga dilakukan oleh IAIN Metro (sekarang UIN Metro) seperti yang tergambar dari penelitian Agus Hamdani yang mendeskripsikan pengalaman IAIN Metro menuju Perguruan Tinggi responsif gender melalui intervensi kebijakan perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG). Program ini dilaksanakan selama 3 tahun dari 2016 – 2018. Melalui observasi implementasi program, wawancara, dan pemetaan dokumen, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengarusutamaan gender di IAIN Metro didukung oleh potensi personal, terbangunnya sistem yang kuat, pola relasi kuasa, dan budaya masyarakat setempat. Potret perjalanan IAIN Metro sebagai piloting Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender memungkinkan untuk diduplikasi di Perguruan Tinggi lain yang memiliki potensi dan kesamaan karakteristik (Mufliha,2018:25).

Definisi pengarusutamaan gender yang biasa dikutip dari PBB melalui *Economic and Social Council* pada tahun 1997, menyatakan bahwa:

*“...proses penilaian implikasi dari setiap aksi terencana bagi perempuan maupun lelaki, termasuk perundang-undangan, kebijakan-kebijakan ataupun program-program, di segala bidang dan semua level. (Pengarusutamaan gender) adalah strategi untuk membuat pertimbangan dan pengalaman para perempuan maupun lelaki menjadi dimensi*

yang integral dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program dalam lingkup politik, ekonomi dan masyarakat sehingga perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang setara dan ketaksetaraan tidak dilanggengkan. Tujuan utama (dari pengarusutamaan gender) adalah mencapai kesetaraan gender.” (UN, 1997 dan dituangkan juga dalam Inpres No. 29/2000)

Dalam upaya percepatan pengarusutamaan gender, maka pemerintah mengeluarkan Surat Edaran No. 270/M.PPN/11/2012; Nomor SE-33/MK.02/2012; Nomor 050/4379A/SJ dan SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dilakukan untuk menjamin agar pembangunan memberi manfaat secara adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan. Melalui perencanaan responsif gender dapat dihasilkan anggaran responsif gender (ARG), dimana kebijakan pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu, ARG harus didahului dengan analisis situasi pada suatu program/kegiatan dengan lensa gender sehingga dapat teridentifikasi kebutuhan perempuan dan laki-laki. ARG tidak berarti adanya penambahan dana khusus untuk program perempuan dan bukan pula merupakan anggaran yang hanya ada dalam program khusus pemberdayaan Perempuan (Nurhaeni, tt).

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya, dan kesetaraan pada kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Bukan hanya penyediaan anggaran pengarusutamaan gender saja yang menjadi fokus ARG, tetapi juga mewujudkan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan.

Pendekatan pengarusutamaan gender ini merupakan penyempurnaan atas pendekatan gender dalam pembangunan sebelumnya dan menjadi salah satu cara paling efektif dalam mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan (Loemban Tobing-Klein, 2009; Radoi, 2012). Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai **kesetaraan dan keadilan** gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Hal ini dimulai dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Menurut World Economic Forum (WEF) dalam *Global Gender Gap Report 2022*, Indonesia mendapat skor indeks ketimpangan gender 0,697 (meningkat 0,009 dari 0,688 pada tahun sebelumnya) dan berada di peringkat ke-92 dari 146 negara (meningkat dari posisi 101 pada tahun sebelumnya). Untuk terus mendorong upaya perbaikan ini, dalam RPJMN 2020-2024, agenda pengarusutamaan gender ditetapkan sebagai salah satu strategi pembangunan nasional yang inovatif dan adaptif. Program pengarusutamaan gender bertujuan untuk memastikan bahwa program pembangunan nasional tidak hanya mencapai dampak ekonomi, tetapi juga memberikan akses pembangunan yang adil dan merata ([pusbinja.bpkp.go.id](http://pusbinja.bpkp.go.id))

Penyempurnaan ini terdapat dalam strategi memindahkan fokus kebijakan dari keadaan subordinasi kaum perempuan menjadi pengarusutamaan atau pengintegrasian perempuan ke dalam semua sektor pembangunan dengan tujuan mencapai kesetaraan dan keberdayaan. (Alston, 2006; Hubeis, 2010). Hal ini seperti yang diungkapkan juga oleh Mansour Fakih dalam karyanya. Akan tetapi Mansour Fakih menggunakan istilah gerakan transformasi gender. Gerakan transformasi gender merupakan gerakan pembebasan perempuan dan laki-laki dari sistem yang tidak adil. Maka transformasi gender adalah upaya liberasi dari segala bentuk penindasan, baik secara struktural, personal, kelas, warna kulit, maupun ekonomi internasional. Transformasi gender sebagai jalan menuju transformasi sosial yang lebih luas harus merupakan proses penghapusan atau penyingkiran segala bentuk ketidakadilan, penindasan, dominasi, dan diskriminasi (Fakih, 2013:165-166). Caplan dalam *The Cultural Construction of Sexuality* mengatakan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidaklah sekedar biologis, namun melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu gender dapat berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis kelamin tidak (Fakih, 2013:75). Zaitunah Subhan juga menyebutkan dalam karyanya bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang gender menegaskan panduan umum untuk mencapai kualitas individu dan Masyarakat yang harmonis. Al-Qur'an tidak memberikan beban gender secara mutlak kepada seseorang, tetapi adalah agar beban gender dapat memudahkan manusia memperoleh tujuan hidup yang mulia baik dunia maupun akhirat (Subhan, 2015:13).

Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan mengacu pada arah dan strategi Pembangunan Pendidikan seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Tujuan pembangunan pendidikan yang diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (Gambar.I). Landasan ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Undang-Undang Nomor 39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Seiring waktu, isu kesetaraan gender telah menjadi isu global yang sangat relevan menyangkut keterpaduan antara kerjasama laki-laki dan perempuan di segala bidang. Sebagai komitmen global dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, Indonesia juga merujuk pada 8 (delapan) tujuan utama *Millenium Development Goals (MDGs)* sampai dengan tahun 2015. Kebijakan ini juga kemudian berkembang menjadi *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang terdiri dari 17 aspek: (1) Tanpa kemiskinan (2) Tanpa Kelaparan (3) Kehidupan sehat dan sejahtera (4) Pendidikan berkualitas (5) Kesetaraan gender (6) Air bersih dan sanitasi layak (7) Energi bersih dan terjangkau (8) Industri, inovasi dan infrastruktur (9) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (10) Berkurangnya kesenjangan (11) Kota dan pemukiman yang berkelanjutan (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab (13) Penanganan perubahan iklim (14) Ekosistem lautan (15) Ekosistem daratan (16) Perdamaian, keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan. (Kementerian PPN/Bappenas: Buku Saku Metadata).

Menyikapi hal ini, pemerintah kemudian menetapkan suatu kebijakan terkait penganggaran pembangunan yang menjadi paket dari PUG. Hal ini bertujuan untuk percepatan PUG dan kegiatannya disebut Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Istilah lain dari PPRG adalah GBS (*gender budget statement*). GBS ini merupakan dokumen dasar dari pengalokasian anggaran yang responsif gender (Anggaran Responsif Gender) untuk suatu bidang atau program.

Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih,2013:7-8;Subhan,2015:2-3). Dalam keseharian dapat dicontohkan bahwa perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sementara untuk laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Perbedaan gender antara manusia dengan jenis laki-laki dan perempuan ini terjadi karena dibentuk, kemudian disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksikan secara sosial atau kultural mealui ajaran keagamaan atau negara.

Upaya mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan di Indonesia telah dilakukan satu dekade lebih. Hal ini terlihat dengan terbitnya INPRES No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. INPRES ini menjadi titik tolak kebijakan yang sangat signifikan untuk mendorong upaya tersebut. Kemudian kebijakan ini dipertegas dalam Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014. Kebijakan ini menetapkan gender sebagai salah satu isu lintas bidang yang harus diintegrasikan dalam semua bidang pembangunan. Adapun lembaga yang diharapkan berperan penting dalam mendukung keberhasilan upaya tersebut adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP & PA) melalui fungsi koordinasi, advokasi dan fasilitasi yang dimilikinya.

Fakta menunjukkan bahwa sejak beberapa tahun terakhir telah banyak upaya mendorong implementasi Anggaran yang Responsif Gender (ARG). Hal ini dimulai dengan dikeluarkannya PMK 109/2009 dengan tujuh kementerian negara/lembaga sebagai pilot di dalam melaksanakan ARG di tahun 2010. PMK 109/2009 kemudian diperbarui lagi dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No.104/PMK 02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2011 dengan fokus pelaksanaan ARG di sektor-sektor ekonomi, politik dan sosial. Perencanaan responsif gender dilaksanakan dengan meintegrasikan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Pada Konferensi Perempuan IV di Beijing tahun 1995, Platform of Action mendukung konsep gender mainstreaming. Secara tegas dinyatakan bahwa pemerintah dan para pengambil keputusan harus terlebih dahulu secara aktif mempromosikan rencana kebijakan-kebijakan dan program yang berspektif gender, kemudian mengintegrasikan kebijakan gender dalam empat tahap manajemen yang berkesinambungan yaitu organisasi dan lembaga perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi mulai dari tingkat nasional, propinsi, hingga kabupaten/kota secara berkelanjutan.

Saat ini semua instansi dan SKPD dari berbagai daerah tengah menggalakkan kegiatan dalam kerangka analisis gender dengan memakai sejumlah metode yang telah dirumuskan para ahli. Namun, metode yang umum digunakan saat ini adalah *Gender Analysis Pathway* (GAP). Ketersediaan data pilah gender pada berbagai unit kerja yang akan menjadi unit analisis merupakan hal yang paling signifikan untuk membuat GBS. Ini menunjukkan bahwa tersedianya data pilah gender baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif menjadi hal yang mutlak. Sementara, fakta yang umumnya diketahui bahwa sistem data di instansi-instansi yang ada belum didesain sebegitu rupa sehingga secara otomatis sistem ini menyajikan laporan tentang data pilah gender.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi yang mendukung program GBS tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak untuk mendukung terciptanya GBS di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Beragam bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh PSGA



diantaranya dengan membuat seminar dan workshop untuk para pemangku kepentingan dan pejabat berwenang di UIN SU. Tidak hanya para pemangku kepentingan, para dosen dan tenaga kependidikan juga diberikan seminar dan pelatihan terkait dengan GBS. Kegiatan rutin lain yang dilakukan oleh PSGA adalah dengan mengadakan sekolah gender yang intensif sekali seminggu.

Penelitian terkait gender dan pengarusutamaan telah banyak dilakukan diantaranya adalah penelitian Ika Arinia Indriyany dkk yang membahas tentang dinamika dan artikulasi kesetaraan gender di ranah perguruan tinggi. Dengan pendekatan fenomenologis, riset ini berupaya memaknai dan melihat aktualisasi kebijakan kampus dalam mendorong perspektif gender menjadi agenda dalam mengembangkan kampus yang berspektif gender. Hasil dari riset ini menunjukkan bagaimana dinamika perempuan dalam mencapai kesetaraan gender pada ruang lingkup perguruan tinggi (Ika dkk:2021,55).

Sementara itu, Thohir Yuli Kusmanto membahas pengarusutamaan gender dari aspek dinamikanya yang ada di perguruan tinggi yaitu di UIN Walisongo Semarang. Kusmanto menemukan bahwa pandangan pimpinan UIN Walisongo ada yang integral dan parsial tentang pengarusutamaan gender, Implementasi PUG; ada kebijakan yang terbuka civitas akademika untuk meraih posisi penting dalam struktur hierarki di UIN Walisongo. Penelitian mengambil isu gender terbuka dan bebas. Banyak peneliti perempuan meneliti beragam tema, pendidikan dan pelatihan penguatan kapasitas perempuan, dan pemetaan kuantitatif tentang gender. PUG memperkuat perjuangan kesetaraan dan keadilan gender, tercapainya kesetaraan dan keadilan gender pada tingkatan tertentu, perkuliahan Islam Kesetaraan Gender dan proporsi perempuan menjabat struktural meningkat.

Bani Syarif Maulana juga telah melakukan penelitian yang memfokuskan pada implementasi pengarusutamaan gender di kurikulum Fakultas Syariah. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kurikulum Fakultas Syariah, terutama matakuliah hukum perkawinan dan hukum waris dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran dalam perkuliahan di PTKI seringkali tidak menggambarkan sebuah overt curriculum yang responsif gender. Hal ini terlihat dari indikator kompetensi (target hasil belajar) yang tidak ditemukan adanya indikator/target yang mengarahkan mahasiswa agar memperoleh pengetahuan di bidang hukum perkawinan dan waris dengan menggunakan pemahaman kesetaraan dan keadilan gender (Maulana, 2020:164).

Penelitian ini akan membahas aspek lain dari pengarusutamaan gender yaitu terkait dengan sistem yang sudah diberlakukan di UIN Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem data pilah gender di UIN Sumatera Utara, efektifitas penggambaran data pilah gender yang ada di UIN Sumatera Utara, serta langkah-langkah dan perangkat struktur dan infrastruktur agar UIN SU memiliki sistem data pilah gender yang terintegrasi.

## **METODE**

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif empiris dan menggunakan pendekatan penelitian terapan. Metode yang digunakan akan disesuaikan dengan arah penelitian ini sebagai penelitian terapan sosial yaitu metode riset aksi partisipatoris (RAP).

Penelitian *Participatory Action Research* merupakan salah satu model penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah bagaimana dalam proses pemberdayaan dapat mewujudkan tiga tolak ukur, yakni adanya komitmen bersama dengan masyarakat, adanya local leader dalam masyarakat dan adanya institusi baru dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan kebutuhan. Penelitian ini membawa proses penelitian dalam lingkaran kepentingan orang dan

menemukan solusi praktis bagi masalah bersama dan isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama, dan memberikan kontribusi bagi teori praktis (Reason, 2008: 1).

Pandangan lain dikemukakan Mansour Fakih yaitu bahwa *Participatory Action Research* adalah kombinasi penelitian sosial, kerja pendidikan, dan aksi politik menggunakan konsep penelitian partisipatif dalam konteks metodologi materialis historis. Ini kemudian didefinisikan oleh Kasam sebagai penelitian yang disusun melalui interaksi demokratis antara peneliti dan kelas rakyat yang tertindas (Fakih, 2007: 28). Interaksi demokratis sebab PAR merupakan “penelitian oleh, dengan, dan untuk orang” bukan “penelitian terhadap orang”. PAR mendorong peneliti dan orang-orang yang mengambil manfaat dari penelitian untuk bekerja bersama-sama secara penuh dalam semua tahapan penelitian.

### 1. Objek dan Informan Penelitian

Dalam penelitian partisipatoris, objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat, dalam hal ini kebutuhan lembaga dan warga pengguna Perguruan Tinggi UIN-SU yaitu data pilah gender dan dokumen analisis gender. Informan penelitian adalah subjek penelitian itu sendiri yang sekaligus akan diposisikan sebagai peneliti juga, yaitu warga dan masyarakat UIN-SU yang akan direpresentasikan oleh fungsional-fungsional penginput data di masing-masing unit.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data lapangan dan menganalisisnya, digunakan metode berbagi cerita (*sharing*), wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*). Dalam FGD misalnya, partisipan atau informan tidak sebatas berdiskusi dalam posisi duduk, melainkan bisa berdiskusi dalam dinamika tertentu dengan menggunakan alat kerja tertentu, misalnya pemetaan gagasan (*mind mapping*), diagram pohon masalah (*problem tree*), grafik kecenderungan (*trend lines*), matriks peringkat atau skala prioritas (*ranking*), diagram keterkaitan/diagram afinitas (*linkage diagram*), dan sebagainya. Dalam penelitian ini akan digunakan penggalan data melalui FGD dengan sejumlah alat kerjanya yang nanti disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta.

### 3. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Riset Aksi Partisipatoris tidak diorientasikan untuk melakukan kesimpulan atas hipotesa kita tentang masyarakat, melainkan menjadi alat dan senjata analisis untuk mendorong berbagai perubahan sosial. Oleh karena itu, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dan analisa data adalah analisis berbasis komunitas (Denzin, 2009: 439).

Bila diikuti maka analisis akan mengikuti 3 siklus; kesepakatan atas desain; analisis berbasis komunitas, dan perubahan masyarakat. Masing-masing siklus meliputi tahapan berikut:

- a. *Planning* atau Perencanaan
- b. Pelaksanaan dan observasi
- c. Refleksi
- d. Revisi perencanaan (Model PTK Kemmis dan Taggart) (Denzin, 2009: 470)

Hasil pengamatan kemudian dievaluasi dalam bentuk refleksi. Apabila hasil refleksi menunjukkan belum adanya perbaikan sesuai yang diinginkan maka kemudian disusun kembali rencana perbaikan yang akan dilakukan dalam siklus berikutnya. Hal demikian terus dilakukan sampai tujuan yang diinginkan untuk mendapatkan data pilah gender tercapai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN



### Kondisi Riil Data pilah Gender di UIN Sumatera Utara

Setelah melakukan penelusuran dan survei awal ke beberapa unit kerja di UIN Sumatera Utara, diperoleh informasi bahwa untuk data pilah gender sendiri belum ada secara khusus. Hal ini diketahui ketika dilakukan pembagian kelompok KKN integratif UIN Sumatera Utara tahun 2017 lalu, ada beberapa kelompok yang tidak seimbang pembagian mahasiswa laki-laki dan perempuan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang panitia KKN bahwa ada diantara kelompok-kelompok tersebut yang hanya mahasiswa laki-laki atau perempuannya terlalu minoritas, hanya 1 atau 2 orang dalam satu kelompok.

Kemudian, dengan melihat form data, dapat diketahui bahwa klasifikasi jenis kelamin sudah dituliskan, hanya saja filter terkait data pilah gendernya belum ada. Ini berarti bahwa ketika ingin mengetahui data mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, harus menggunakan cara manual, dikalkulasikan sendiri berdasarkan data jenis kelamin yang sudah tersedia di form data akademik. Hal yang sama juga ditemukan pada data akademik mahasiswa. Namun, pada data pengunjung perpustakaan sudah ada perkembangan karena dalam sistem informasi pengunjung perpustakaan sudah ada filterisasi data gender dari pengunjung perpustakaan tersebut sehingga bisa dilihat jumlah pengunjung perempuan dan laki-laki dalam sehari, sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut:



Menurut informasi, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (Pustipada) sendiri menyatakan bahwa data pilah gender belum tersedia karena belum adanya regulasi dari Rektor, selain itu juga perlu dukungan aplikasi yang bisa menjadi panduan untuk membuat data pilah gender di perguruan tinggi. Berkaitan dengan hal ini dan dengan sudah adanya sosialisasi dari Pusat Studi Gender dan Anak UIN Sumatera Utara maka dipandang perlu untuk membuat sebuah sistem yang menggambarkan data pilah gender di UIN Sumatera Utara. Tidak hanya data mahasiswa, dosen dan pegawai, tetapi juga data pilah terkait sarana dan prasarana kampus. Hal ini karena akan berimbas terhadap pembuatan anggaran dan kebijakan yang responsif gender.

### Implementasi Data Pilah Gender di UIN Sumatera Utara

Menyahuti sosialisasi yang dilakukan oleh Pusat Studi Gender dan Anak UIN Sumatera Utara, tim Pustipada telah berupaya melakukan perbaikan pada sistem informasi yang dibutuhkan oleh kampus terkait data mahasiswa, dosen dan pegawai. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan memperbaiki klasifikasi jenis kelamin pada beberapa sistem informasi yang ada.

Ada banyak sistem informasi yang dikembangkan oleh Pustipada seperti Sistem Informasi Beban Kinerja Dosen, sistem informasi data pengunjung perpustakaan, Sistem Informasi Daftar Kehadiran Perkuliahan, Sistem Informasi Kuliah Kerja Nyata, Portal Sistem Informasi Akademik, Sistem Informasi Pangkalan Data Internal yang memuat data mahasiswa aktif, dan data kepegawaian UIN Sumatera Utara. Beberapa sistem yang disediakan tersebut, sebagian sudah dilakukan pembaharuan yaitu dengan adanya data klasifikasi jenis kelamin. Mislanya, ketika membuka data pengunjung perpustakaan akan ditemukan informasi berapa orang pengunjung pria dan wanita dalam sehari. Data ini bukan hanya memuat jumlah secara keseluruhan tetapi juga sudah dipisahkan berdasarkan fakultasnya.

Kemudian dalam data informasi akademik juga akan ditemukan data mahasiswa laki-laki-laki dan perempuan, walaupun belum dalam bentuk grafik, diagram atau angka secara jelas seperti pada data pengunjung perpustakaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh kepala sub bagian akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat:

*“Untuk data akademik berdasarkan jenis kelamin sudah ada di portal sistem informasi akademik, akan tetapi untuk jumlah total atau yang menyebutkan tentang data pilah gendernya belum ada. Sehingga untuk persiapan visitasi borang program studi kemarin kami melakukan penghitungan secara manual. Maka data yang tersaji pun juga adalah data pilah gender dengan hitungan sistem manual”*

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala PUSTIPADA bahwa dalam sistem data mahasiswa sudah terintegrasi sampai ke fakultas. Secara sederhana bisa dikatakan data jumlah total mahasiswa di fakultas sudah bisa diberikan. Namun, data jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelaminnya, sistem belum bisa memberikan total jumlahnya secara otomatis. Untuk mendapatkan datanya tersebut, baru bisa dilakukan penghitungan secara manual atau dengan sistem yang lain. Khusus untuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa juga dibuat satu aplikasi khusus yang diberi nama SI LIANA. Aplikasi ini memuat tentang nama-nama mahasiswa yang mengikuti kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) setiap tahunnya. Mahasiswa langsung mendaftar melalui aplikasi ini, begitu juga dengan dosen yang akan menjadi surveyor dan dosen pembimbing lapangan KKN tersebut.

Sementara, untuk data pengunjung perpustakaan sudah bisa diketahui data pilah gendernya. Pada sistemnya sendiri sudah menunjukkan data mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan dilengkapi dengan identitas umum mahasiswa seperti nama, NIM, fakultas, dan jenis kelamin. Ini memudahkan untuk mengetahui data jumlah pengunjung perempuan dan laki-laki dalam 1 hari.

Aplikasi yang khusus digunakan di perpustakaan adalah Sistem informasi Data Pengunjung disingkat SI-Tanjung (Sistem Informasi Data Pengunjung). Sistem ini dioperasikan mulai tahun 2017, masih aktif dan eksis sampai sekarang. Ini berarti yang telah mengaplikasikan hasil sosialisasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) baru Perpustakaan UIN Sumatera Utara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Perpustakaan UIN Sumatera Utara:

*“Tim atau pihak perpustakaan segera mengkomunikasikan atau lebih tepatnya meminta kepada tim ahli programmer PUSTIPADA UIN SU untuk membuat sistem data pengunjung yang sudah ada data pilah gendernya. Ini dilakukan setelah kami mengikuti kegiatan sosialisasi PPRG yang diadakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Sumatera Utara. Adanya aplikasi ini juga memudahkan bagi tim yang ada di perpustakaan mengetahui data pengunjung berdasarkan jenis kelaminnya untuk setiap fakultas.”*

Ada juga beberapa sistem lain yang mendukung kegiatan akademik kampus diantaranya adalah sistem informasi daftar hadir perkuliahan online (SI-DAHLIA) yang memuat tentang

kegiatan perkuliahan setiap harinya, akan tetapi data yang tersimpan masih terkait dengan teknis perkuliahan seperti nama dosen, mata kuliah, notulasi perkuliahan, dan nama mahasiswa yang juga belum disebutkan data pilah gendernya. SI-DAHLIA ini juga terkait dengan sistem lainnya seperti SI-BEJO (Sistem Informasi Beban Kinerja Dosen Online) yang memuat hasil kinerja dosen selama satu semester sebagai bahan laporan kinerja dosen setiap bulannya. Selain SI BEJO, web lain yang juga terkait dengan SI-DAHLIA adalah web yang menjelaskan tentang mahasiswa bimbingan akademik, Dosen Penasihat Akademik, dan penilaian perkuliahan setiap semester yaitu web <http://portalsia.uinsu.ac.id>.

Untuk data kepegawaian belum terlihat adanya pengklasifikasian jenis kelamin. Hal ini menyebabkan informasi data jumlah pegawai pria dan wanita juga agak sedikit menyulitkan. Kondisi ini sebagaimana pernyataan dari salah seorang kepala sub bagian administrasi umum dan keuangan Fakultas Sains dan Teknologi:

*“Data kepegawaian kita yang ada masih bersifat umum. Kita belum punya data dosen dan pegawai yang sudah terpilah gender. Walaupun sebenarnya ada informasi tentang jenis kelamin, tetapi terkadang itu tidak semua. Kondisi yang ada malah sebagian diantaranya bahkan belum dituliskan jenis kelaminnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mendapatkan informasi lengkap dan cepat terkait jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai Badan Layanan Umum (BLU) kita yang laki-laki dan perempuan, berapa jumlah dosen PNS dan BLU laki-laki dan perempuan, dan yang lainnya. Jadi ketika ada yang bertanya, kita mesti melakukan penghitungan secara manual, buka data lagi.”*

### **Langkah-Langkah yang Akan Dilakukan**

Adapun strategi yang akan dilakukan supaya data pilah gender dapat terlaksana dengan baik, diantaranya adalah:

1. Perlunya dilakukan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran civitas akademika tentang data pilah gender.
2. Dipandang perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian civitas akademika UIN tentang pentingnya data pilah gender.
3. Agar lebih maksimal dan terarah, pihak kampus dipandang perlu melibatkan pihak yang berkompeten di UIN untuk pembuatan sistem data pilah gender

Proses di atas telah dimulai dengan dilakukannya sosialisasi oleh Pusat Studi Gender dan Anak pada tahun 2017 yang memberikan informasi terkait Gender Budget System dan Gender Anlysis Pathway ke semua unit dan semua fakultas yang ada di UIN Sumatera Utara. Untuk mendukung supaya pembuatan data pilah gender di UIN Sumatera Utara ini dapat dilakukan dengan baik, maka perlu untuk membangun komitmen dan kapasitas sehingga proses untuk mencapai sistem data pilah gender yang terintegrasi bisa tercapai dengan baik dan lancar. Jika semua civitas akademika sudah berkomitmen untuk melaksanakannya maka tentunya kapasitas UIN Sumatera Utara juga akan meningkat dan bisa menjadi contoh juga bagi perguruan tinggi lainnya yang ada di Indonesia khususnya Sumatera Utara. Sistem Informasi Eksekutif merupakan suatu komputasi yang sering digunakan oleh eksekutif suatu organisasi dalam menganalisa masalah dengan tepat dan mendeteksi kecenderungan indikator penting suatu manajemen. Dewasa ini, hampir seluruh kegiatan dari beragam organisasi memerlukan dukungan informasi yang lengkap, cepat, dan akurat dalam pengambilan keputusan yang tepat terlebih jika data dapat dipilah berdasarkan gender.

Program studi (selanjutnya disebut prodi) sebagai bagian dari suatu organisasi besar universitas membutuhkan suatu sistem informasi yang bisa digunakan untuk mendapatkan,

mengolah, dan menyebarkan informasi untuk menunjang kegiatan operasional sehari-hari. Tidak hanya itu, tetapi juga penting untuk membantu proses pengambilan keputusan strategis. Kebutuhan eksekutif terhadap data akademik misalnya adalah informasi mengenai karakteristik peminat dan mahasiswa baru yang akan dipergunakan untuk membantu menentukan strategi sosialisasi ujian masuk. Kemudian informasi tentang rasio pendaftar ulang dan jumlah yang diterima, bisa dipergunakan untuk mendukung pembuatan strategi perbaikan. Selain itu, kebutuhan akan adanya informasi rata-rata lama studi mahasiswa berdasarkan data pilah gendernya dapat dimanfaatkan untuk membantu proses evaluasi pembelajaran.

Dengan adanya sistem informasi yang sudah memuat data pilah gender di semua aplikasi yang ada di UIN Sumatera selain telah mengaplikasikan program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) juga berarti telah merealisasikan isyarat dari surat Al-Hujurat: 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
حَبِيرٌ (١٣)

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat ini menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah SWT, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan yang lain ataupun perbedaan nilai kemanusiaan laki-laki dan perempuan. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi daripada yang lain karena bangsa, suku, warna kulit atau jenis kelaminnya. Semua orang mendapatkan kesempatan yang sama, mendapatkan peluang sama dalam berbagai aspek kehidupan ini. Begitu juga laki-laki dan perempuan, meskipun secara kodrat, masing-masing sudah punya tugas dan kewajibannya. Namun, untuk berperan dalam bisang sosial dan di ranah publik, semua mendapatkan bagian. Jika dibawa ke dunia kampus, adanya sistem data pilah gender bisa menjadi pedoman bagi pengambil kebijakan untuk memberikan kesempatan yang sama untuk mahasiswa laki-laki dan perempuan, untuk dosen dan tenaga kependidikan pri dan wanita. Sehingga dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan baik di luar ataupun di dalam kampus, tidak hanya satu jenis kelamin apakah itu pria ataupun wanita yang berpartisipasi. Dapat dicontohkan pada kegiatan terkait workshop gender, tidak hanya perempuan saja yang mengikuti tetapi juga laki-laki juga bisa ikut serta, contoh lain pelatihan peningkatan kualitas teknologi informasi dosen, ini juga bisa diikuti oleh semua baik laki-laki ataupun perempuan.

## SIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan statuta UIN Sumatera Utara belum ada secara khusus memuat tentang sistem pembelajaran dan manajemen lembaga yang adil gender. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, tetapi statutanya masih dalam proses untuk membuat kebijakan yang adil gender. Sistem data yang ada memuat data pilah gender dengan bentuk pengklasifikasian jenis kelamin belum terlaksana secara efektif. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya sistem informasi data yang belum memunculkan klasifikasi data jenis kelamin seperti pada data tenaga pendidik dan kependidikan yang termuat dalam data kepegawaian UIN SU. Selain itu juga pada data mahasiswa yang mendaftar, mahasiswa yang mengikuti perkuliahan, mahasiswa yang

mendapat beasiswa dan yang lainnya. Meskipun demikian, pihak Pustipada sendiri sebagai tim yang bergerak di bidang informasi dan data kampus berusaha terus melakukan perbaikan untuk mewujudkan data civitas akademik UIN Sumatera Utara yang responsif gender.

## SUMBER RUJUKAN

- Indriyany, Ika Arinia, M. Dian Hikmawan, Wahyu Kartiko Utami, *Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender*, JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.6, No. 1, 2021, h. 55-72
- Afandi, Agus, dkk, 2013, *Modul Participatory Action Research (PAR)* (IAIN Sunan Ampel Surabaya: Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM)
- Bab VII Ketentuan Lain Pasal 19 Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 81 tahun 2017
- Reason, P. and H. Bradbury, 2008, *The Sage Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice*. California: Sage
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research* (Terj:Dariyantno dkk.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Agama RI, 2018, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro
- Dokumen GAP dan GBS UIN Sumatera Utara, Program PPRG Pendis KEMENAG-UIN Sumatera Utara tahun 2017
- Fakih, Mansour, 2007, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- \_\_\_\_\_, 2013, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- <http://www.ristek.go.id/file/upload/Referensi/2010/indikator/C6%20Gender.pdf>
- <https://pusbinjfa.bpkp.go.id/web/berita/baca/2022/11/11/636e1e56b0ea22c7110f35f8/akselerasi-upaya-pengarusutamaan-gender>
- Inpres No. 29, Tahun 2000 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- Kementerian PPN/Bappenas, tt, *Buku Saku Terjemahan dan Tujuan Target Global*.
- Lubis, Nur Ahmad Fadhil, 2003, *Yurisprudensi Emansipatif*, Bandung: Citapustaka Media
- Maulana, Bani Syarif, *Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Kurikulum Fakultas Syariah*, Jurnal Equalita, Volume (2), Issue (2), Desember 2020, h. 164-181
- Nugroho, Riant, 2011, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, tt, *Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)*, Jakarta: AIPD (Australia-Indonesia Partnership for Decentralisation)
- PDF File Buku Data Terpilah Gender diunduh tanggal 21 Agustus 2018
- Ritzer, George, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group

- Subhan, Zaitunah, 2015, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Jakarta: Kencana
- Umar, Nasaruddin, 1999, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina  
PDF file tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Kementerian Perdagangan diunduh tanggal 21 Agustus 2018
- Wijayati, Mufliha, Elfa Murdiana, Agus Hamdani, *Jalan Terjal Menuju Perguruan Tinggi Responsif Gender: Lesson Learned Program Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender IAIN Metro*, IJOUGS: Indonesia Journal of Gender Studies, Volume 3 Nomor 1 2022, h. 25-53
- Yuliani, Irma, Isnatin Ulfah, *Menuju Perguruan Tinggi Responsif Gender: Mengukur Kesiapan IAIN Ponorogo Dalam Implementasi Indikator PTRG Melalui SWOT Analysis*, SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak Vol.4, No.2, Desember 2022. ISSN: 2720-9059; E-ISSN: 2716-2230, h. 195-210
- Zuhriah, Ervaniah, *Makalah Data Pembuka Wawasan*, disampaikan pada FGD Sosialisasi Pentingnya Data Pilah Gender di Hotel Garuda Medan pada 03 Agustus 2018